

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH, KESESUAIAN KOMPENSASI DAN
MORALITAS TERHADAP KECURANGAN LAPORAN
KEUANGAN DAERAH**
(Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Kota Padang)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S1) Program Studi Akuntansi
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

SRI GUSDINETI
77763 / 2006

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

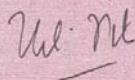
**PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH, KESESUAIAN KOMPENSASI DAN MORALITAS
TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH**
(Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Kota Padang)

Nama : SRI GUSDINETI
NIM/BP : 77763 / 2006
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2011

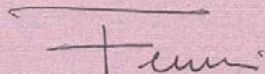
Disetujui Oleh:

Pembimbing 1



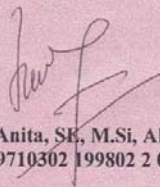
Nelvirita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19740706 199903 2 002

Pembimbing 2



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, Kesesuaian Kompensasi dan Moralitas
Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Daerah
(Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Kota
Padang)

Nama : Sri Gusdineti

Nim / Bp : 77763 / 2006

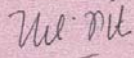
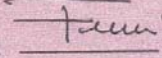
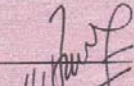
Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2011

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua : Nelvirita, SE, M. Si, Ak	1. 
2. Sekretaris : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	2. 
3. Anggota : Lili Anita, SE, M.Si, Ak	3. 
4. Anggota : Herlina Helmi, SE, ME, Ak	4. 

ABSTRAK

Sri Gusdineti (2006/77763) Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kesesuaian Kompensasi dan Moralitas Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Padang. Skripsi. Universitas Negeri Padang. 2011

Pembimbing I : Nelvirita, SE, M.Si, Ak

Pembimbing II : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kecurangan laporan keuangan daerah, 2) pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan laporan keuangan daerah, dan 3) pengaruh moralitas terhadap kecurangan laporan keuangan daerah, pemerintahan Kota Padang.

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang dengan responden 2 orang staf akuntansi pada masing-masing SKPD tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara total sampling yaitu dengan menjadikan seluruh populasi sebagai sampel. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan *Statistical Package For Social Science* (SPSS) 15.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa: 1) penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan laporan keuangan daerah dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,012 > 1,6698$ (sig $0,049 < \alpha 0,05$) yang berarti H_1 diterima, 2) kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan laporan keuangan daerah dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,051 > 1,6698$ (sig $0,045 > \alpha 0,05$) yang berarti H_2 diterima, dan 3) moralitas berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan laporan keuangan daerah dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,335 > 1,6698$ (sig $0,023 < \alpha 0,05$) yang berarti H_3 diterima,

Saran dalam penelitian ini adalah : 1) Bagi instansi pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sistem pengendalian intern pemerintah, kompensasi dan moralitas pegawai dalam pembuatan laporan keuangan agar tingkat kecurangan laporan keuangan daerah dapat terus dikurangi bahkan dapat dihilangkan. 2) untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap kecurangan laporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh pemerintah serta dapat disertai dengan penelitian kualitatif dan pergantian sampel penelitian dan dilakukannya perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur Penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kesesuaian Kompensasi dan Moralitas Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Padang**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih terutama kepada Ibu Nelvirita, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing I, dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.
5. Ayah dan ibu, Kakak beserta Adik-adik dan seluruh Keluarga Besar Penulis yang telah memberikan do'a, perhatian, dan kasih sayang serta pengorbanan dan bantuan baik secara moril maupun materil untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi angkatan 2006 yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk semua pihak yang telah membantu penyelesain skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan saran maupun kritik dari pembaca guna kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Padang, Februari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	8
D. Perumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Landasan Teori	11
1. Kecurangan	11
a. Definisi Kecurangan	11
b. Faktor Kecurangan	13
c. Bentuk Kecurangan.....	16
d. Kecurangan Laporan Keuangan.....	19

2. Sistem Pengendalian Intern pemerintah	21
a. Pengertian SPIP.....	21
b. Ciri-ciri SPIP	23
c. Elemen-elemen SPIP.....	24
3. Kompensasi.....	26
a. Pengertian Kompensasi.....	26
b. Tujuan Manajemen Kompensasi.....	28
c. Komponen Kompensasi	29
d. Metode Kompensasi.....	31
4. Moralitas	32
B. Penelitian Relevan	34
C. Hubungan Antar Variabel	36
D. Kerangka Konseptual	40
E. Hipotesis Penelitian	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Populasi Dan Sampel	43
C. Jenis Dan Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Variabel Penelitian	46
F. Instrumen Penelitian	46
G. Uji Validitas Dan Reliabilitas	48
H. Hasil Uji Coba Instrumen	50

I. Uji Asumsi Klasik	51
J. Teknik Analisis Data	53
K. Definisi Operasional	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	59
B. Demografi Responden.....	60
C. Deskripsi Variabel Penelitian	62
D. Statistik Deskriptif	68
E. Hasil Uji Validitas Dan Reabilitas	69
F. Hasil Uji Asumsi Klasik	70
G. Hasil Penelitian	74
H. Pembahasan	79
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Keterbatasan	87
C. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama SKPD Pemerintah Kota Padang	43
2. Skala Pengukuran.....	45
3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	46
4. Nilai Cronbach's Alpha & Corrected Item Total Correlation.....	49
5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	58
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis kelamin	59
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	60
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja	61
9. Distribusi Frekuensi Variabel Kecurangan Lap. Keu. Daerah.....	62
10. Distribusi Frekuensi Variabel Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	63
11. Distribusi Frekuensi Variabel Kesesuaian Kompensasi	65
12. Distribusi Frekuensi Variabel Moralitas	66
13. Statistik Deskriptif	67
14. Nilai Corrected Item Total Correlation Penelitian	68
15. Nilai Cronbach's Alpha	69
16. Uji Normalitas	70
17. Uji Multikolinearitas	71
18. Uji Heteroskedastisitas	72
19. Koefisien Determinasi (R^2).....	73

20. Koefisien Regresi	74
21. Uji F Hitung	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Kuesioner Penelitian
2. Distribusi Frekuensi Skor Variabel
3. Hasil Analisis Validitas dan Realibilitas Penelitian
4. Statistik Deskriptif
5. Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas
6. Uji Hipotesis
7. Surat Izin Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era persaingan yang semakin ketat, telah memicu seseorang yang berada di posisi tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan. Tindakan kecurangan yang dilakukan tersebut berusaha disembunyikan dengan berbagai cara untuk memperoleh suatu tujuan tertentu. Apalagi dalam dunia pemerintahan yang dipengaruhi oleh kekuasaan, praktik kecurangan sangat mudah dilakukan tanpa diketahui oleh pihak lain. Tetapi bagaimanapun, yang namanya kecurangan tentunya dapat merugikan pihak lain bahkan orang banyak.

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, semakin memantapkan pemerintah dalam membuat laporan keuangan. PP No.24 Tahun 2005 tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pemerintah karena dijadikan sebagai pedoman atau panduan dalam menyajikan laporan keuangan serta untuk menghindari adanya perbedaan persepsi dan pemahaman antara pemerintah daerah sebagai penyaji laporan keuangan dengan pengguna laporan keuangan serta pemeriksa laporan keuangan (auditor).

Penggunaan laporan keuangan daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, mengharuskan laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah haruslah disajikan secara relevan dan reliabel serta perlu dilengkapi dengan adanya pengungkapan (*disclosure*) yang lebih memadai mengenai informasi-

informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Selain itu, informasi-informasi yang tersaji dalam laporan keuangan haruslah dapat dipercaya dan akurat serta tidak adanya salah saji yang material yang disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Salah satu perilaku yang akan menimbulkan kerugian yang sangat besar adalah kecurangan dalam pelaporan keuangan, dengan dilakukannya perbuatan-perbuatan ilegal melalui pelanggaran hukum pribadi atau publik.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) No.16, kecurangan (*fraud*) dijelaskan dengan istilah kejanggalan/ketidakberesan (*irregularities*). Menurut pernyataan tersebut, *irregularities* menunjukkan pendistorsian secara sengaja terhadap laporan keuangan. Misalnya berupa : manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan terhadap catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang merupakan sumber penyajian laporan keuangan.

Menurut Sawyer (2006), ada tiga faktor atau kondisi yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu : situasi akan kebutuhan yang dipengaruhi oleh alasan keuangan, lingkungan yang mengundang terjadinya penggelapan karena faktor kontrol intern lemah, dan karakteristik atau perilaku seseorang yang menjadi dasar untuk melakukan kecurangan tersebut. Sedangkan menurut Amin (2009), ada beberapa faktor atau kondisi yang biasanya dapat membuat seseorang melakukan tindakan kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu : insentif untuk melakukan kecurangan, kesempatan untuk melakukan kecurangan, tingkah laku/rasionalisasi untuk membenarkan tindakan curang.

Kecurangan laporan keuangan adalah perilaku yang disengaja untuk menghasilkan laporan keuangan yang salah secara material (Amin, 2009). Kecurangan dalam laporan keuangan merupakan hal yang sangat fatal. Laporan keuangan sebagai bagian dari pertanggungjawaban haruslah disajikan dengan andal dan relevan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut tidak dirugikan. Menurut Mardi (2009), jika terjadi kecurangan pada instansi pemerintah, maka akan menyebabkan menurunnya kinerja SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah dan menghambat pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

Peningkatan kecurangan yang terjadi dalam pelaporan keuangan akan membahayakan pengambilan keputusan ekonomi di dalam masyarakat, karena laporan keuangan tersebut digunakan sebagai informasi yang mengukur hasil kinerja selama periode tertentu. Informasi ini dinyatakan dalam angka (kuantitatif) bukan kualitatif dengan salah satu pertimbangan adalah agar dapat diperbandingkan dengan entitas ekonomi yang lain. Untuk menghindari peningkatan kecurangan dalam pelaporan keuangan, maka diperlukanlah suatu sistem yang mengatur tentang pengendalian dalam suatu perusahaan yang disebut dengan sistem pengendalian intern.

Menurut Arens (2004), pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori sebagai berikut : (1) keandalan laporan keuangan, (2) efektifitas dan efisiensi dari operasional dan (3) pemenuhan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang biasa diterapkan. Sedangkan menurut PP No. 60 Tahun

2008, sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawainya untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Amin (2009), untuk mendukung perangkat anti kecurangan terhadap laporan keuangan, diperlukan pengendalian intern yang ketat. Pengendalian intern yang efektif akan mempersulit seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan terhadap laporan keuangan kecuali terdapatnya suatu kolusi. Selain itu, *National Commission On Fraudulent Financial Reporting* dalam Amin (2009) juga menyatakan bahwa pengendalian internal sangatlah penting dalam mengurangi kejadian pelaporan keuangan yang curang, selain itu pemberian kompensasi juga mempengaruhinya.

Menurut Veithzal (2006), kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi MSDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individu sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian. Menurut Sawyer (2006), kecurangan dapat terjadi karena adanya faktor situasi akan kebutuhan. Situasi ini dapat disebabkan oleh alasan keuangan karena pengeluaran atau kerugian uang lainnya yang tidak dapat ditutupi oleh sumber daya keuangan yang normal dari individu tersebut.

Faktor ini dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan pencurian, pemalsuan, atau perubahan akuntansi dan sistem pencatatan lainnya.

Menurut Amin (2009), pemberian kompensasi terhadap karyawan dapat mengarah kepada perlakuan yang tidak semestinya terhadap kas. Seorang karyawan yang memiliki masalah keuangan bisa menyalahgunakan kas atau uang yang ada di tangannya. Kewajiban keuangan pribadi dapat menimbulkan tekanan bagi seseorang untuk melakukan tindakan pencurian atau menyalahgunakan aktiva/kas. Amin (2009) juga mengatakan bahwa adanya promosi, kompensasi atau hadiah yang tidak sesuai dengan harapan akan memicu faktor terhadap terjadinya praktik kecurangan pelaporan keuangan.

Menurut Lillie dalam Asri (2004), kata moral berasal dari kata *moral* (bahasa latin), yang berarti tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat. Sedangkan menurut Magnis-Suseno dalam Budiningsih (2004), moralitas merupakan sikap hati orang yang terungkap dalam tindakan lahiriah. Moralitas terjadi apabila orang mengambil sikap yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawab dan bukan karena ia mencari keuntungan.

Persoalan moral adalah sesuatu yang sangat perlu diperhatikan. Hal itu disebabkan oleh banyaknya penyimpangan tingkah laku yang dilakukan manusia. Salah satu bentuknya ialah melakukan kecurangan. Jika seseorang memiliki moral dasar yang jujur, maka ia tidak akan tergoda untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hati nuraninya (Sawyer, 2006). Amin (2009) menyatakan bahwa moral atau tingkah laku juga akan menjadi faktor pemicu kecurangan terhadap laporan keuangan. Adanya perubahan tingkah laku atau moral bisa

menjadikan seseorang menyalahgunakan kas/aktiva yang ada. Penyalahgunaan ini nantinya akan berusaha ditutupi melalui manipulasi terhadap laporan keuangan.

Sementara itu, kasus kecurangan yang terjadi baru dapat diidentifikasi setelah BPK melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. Pemeriksaan yang dilakukan BPK menemukan adanya indikasi kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah Kota Padang diantaranya yaitu : pada tahun anggaran 2006, adanya dana sebesar Rp. 100.000.000,00 yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, setelah BPK melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang pada Tahun 2007, terdapat uang daerah Pemerintah Kota Padang yang disimpan oleh bendahara dan pihak lain sebesar Rp.7.742.884.601,00 sehingga diduga menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi, dan pengelolaan aset daerah pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang belum tertib dan nilai aset tetap yang disajikan per 31 Desember 2007 sebesar Rp.2.659.235.754.149,62 tidak dapat diyakini kewajarannya karena belum dicatat berdasarkan prosedur akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan. BPK juga menyatakan bahwa terdapatnya indikasi kecurangan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kota Padang salah satu faktornya adalah lemahnya sistem pengendalian intern (www.bpk.go.id).

Sedangkan menurut Tawaf (2007), modus operasi korupsi atau kecurangan yang paling umum dilakukan adalah dengan pengambilan komisi yang dilakukan oleh BUMN/BUMD dan proyek atau lembaga pemerintah dengan memanfaatkan kelemahan sistem pengendalian intern. Semua perbuatan ini dilakukan secara kolusi dengan melibatkan beberapa pihak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006), menyatakan bahwa pengendalian intern yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan negatif terhadap kecurangan akuntansi di perusahaan tersebut. Kesesuaian kompensasi memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap kecurangan akuntansi, dan moralitas memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan akuntansi pada perusahaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wilopo (2006) yang melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi : Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan yaitu peneliti melakukan penelitian pada instansi atau dinas-dinas Pemerintah Daerah Kota Padang saja, sedangkan Wilopo meneliti pada perusahaan publik dan BUMN yang ada di Indonesia. Perbedaan ini bertujuan untuk melihat apakah sistem pengendalian intern pemerintah, kesesuaian kompensasi dan moralitas berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Padang.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mengurangi atau menghindari adanya tindakan kecurangan terhadap laporan keuangan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kesesuaian Kompensasi dan Moralitas terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Padang”** pada instansi-instansi pemerintah yang ada di Kota Padang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah penyebab terjadinya kecurangan ?
2. Apa saja bentuk-bentuk kecurangan yang dapat dilakukan ?
3. Apakah penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan daerah ?
4. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan daerah ?
5. Apakah moralitas berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan daerah?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu seberapa besar penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, kesesuaian kompensasi dan moralitas aparatur pemerintah mempengaruhi kecurangan laporan keuangan daerah Pemerintah Kota Padang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapabesar pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kecurangan laporan keuangan daerah ?

2. Seberapabesar pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan laporan keuangan daerah ?
3. Seberapabesar pengaruh moralitas (sikap) terhadap kecurangan laporan keuangan daerah?

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti mengenai :

1. Seberapa besar penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan daerah.
2. Seberapa besar kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan daerah.
3. Seberapa besar moralitas atau sikap berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan daerah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini agar dapat menjadi bahan untuk menambah pengetahuan tentang pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, kesesuaian kompensasi dan moralitas terhadap kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini agar dapat memberikan gambaran bahwa masih adanya terjadi kecurangan terhadap laporan keuangan daerah yang disajikan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti tentang adanya tingkat kecurangan terhadap laporan keuangan yang dipengaruhi oleh variabel seperti sistem pengendalian intern pemerintah, kompensasi dan moralitas.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Agar dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan menambahkan variabel-variabel lain yang juga dapat mempengaruhi kecurangan laporan keuangan.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Kecurangan

a. Definisi Kecurangan

Menurut Arens (2004), kecurangan adalah setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang lain. Sedangkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) No.16, kecurangan (*fraud*) dijelaskan dengan istilah kejanggalaan/ketidakberesan (*irregularities*). Menurut pernyataan tersebut, *irregularities* menunjukkan pendistorsian secara sengaja terhadap laporan keuangan. Misalnya berupa : manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan terhadap catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang merupakan sumber penyajian laporan keuangan.

Menurut Belkaoui (2006), kecurangan merupakan pengelabuan yang disengaja yang dilakukan oleh orang lain melalui kebohongan dan penipuan untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, pribadi, sosial, atau politik yang tidak adil atas orang tersebut. Menurut Sawyer (2006), kecurangan singkatnya adalah sebuah representasi yang salah atau menyembunyian fakta-fakta yang material untuk mempengaruhi seseorang agar mau mengambil bagian dalam suatu hal yang berharga. Sedangkan Menurut *Institute of Internal Auditors (IIA)* dalam Sawyer (2006), kecurangan meliputi serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu. Tindakan tersebut dapat dilakukan untuk

keuntungan ataupun kerugian organisasi oleh orang-orang di luar maupun di dalam organisasi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 378, kecurangan merupakan perbuatan curang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melalui melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Undang-Undang Kriminal Michigan dalam Belkaoui (2006), menyatakan bahwa :

Kecurangan adalah istilah generick, dan merupakan seluruh ragam cara yang dapat diciptakan oleh kecerdasan manusia, yang dilakukan oleh seseorang untuk meraih keuntungan dari orang lain melalui penyajian yang salah. Tidak ada aturan yang pasti dan tidak variabel yang dapat dinyatakan sebagai pernyataan umum dalam mendefinisikan kecurangan, karena hal ini mencakup kejutan, tipuan, kelicikan, dan cara-cara yang tidak jujur yang digunakan untuk menipu orang lain. Satu-satunya batasan yang mendefinisikannya adalah hal-hal yang membatasi ketidakjujuran manusia.

IAI (2001) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut penyalahgunaan atau penggelapan) dan berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.

Menurut Sawyer (2006), ada banyak istilah dari kecurangan, yaitu :

1) Kecurangan (*fraud*)

Kecurangan singkatnya adalah sebuah representasi yang salah atau menyembunyikan fakta-fakta yang material untuk mempengaruhi seseorang agar mau mengambil bagian dalam suatu hal yang berharga.

2) Kejahatan kerah putih (*white collar crime*)

Kejahatan kerah putih didefinisikan sebagai tindakan kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara nonfisik melalui menyembunyikan ataupun penipuan untuk mendapatkan uang atau harta benda, untuk menghindari pembayaran, atau untuk mendapatkan keuntungan bisnis atau pribadi.

3) Penggelapan (*Embezzlement*)

Penggelapan adalah konversi secara tidak sah untuk kepentingan pribadi, harta benda yang secara sah berada di bawah pengawasan pelaku kejahatan.

b. Faktor-Faktor Kecurangan

Menurut Amin (2009), ada beberapa faktor atau kondisi yang biasanya dapat membuat seseorang melakukan tindakan kecurangan dalam pelaporan keuangan, yaitu :

1) Insentif untuk melakukan kecurangan.

- a. Porsi yang tidak signifikan dari kompensasi.
- b. Adanya sejumlah besar uang di tangan atau yang sedang diproses.
- c. Barang persediaan yang berukuran kecil dengan yang nilai tinggi.

- 2) Kesempatan untuk melakukan kecurangan.
- 3) Tingkah laku/rasionalisasi untuk membenarkan tindakan curang.

Menurut Sawyer (2006), ada tiga faktor yang berhubungan dengan kecurangan. Tiga faktor ini bersifat kolektif dan dapat terjadi dengan tingkatan yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut adalah :

a) Situasi akan kebutuhan

Situasi ini dapat disebabkan oleh alasan keuangan yang dipengaruhi oleh kompensasi atau upah yang diterima, karena pengeluaran atau kerugian uang lainnya yang tidak dapat ditutupi oleh sumber daya keuangan yang normal dari individu tersebut. Contohnya adalah keluarga yang sakit, perjudian, hidup melebihi kemampuan pribadi, dan sebagainya. Hal ini dapat saja memotivasi munculnya pemikiran untuk berusaha mendapatkan uang, yang seringkali dianggap meminjam, dengan tidak memiliki maksud untuk membayarnya kembali.

b) Lingkungan yang mengundang terjadinya penggelapan

Hal ini biasanya merupakan situasi dimana tidak terdapat kontrol, atau kontrol internnya lemah, atau terdapat kontrol intern namun tidak berfungsi.

c) Karakteristik perilaku seseorang

Kedua kondisi diatas dapat terjadi, namun jika individu tersebut memiliki sifat jujur yang tinggi, kecurangan tidak akan dilakukan. Akan tetapi, kasus-kasus ekstrem dari unsur pertama diatas, ditambah dengan situasi kontrol intern yang lemah dari unsur yang kedua, dapat menguasai moral

dasar seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan dan penyelewengan.

Selain itu, terdapat juga tiga gabungan kondisi lain yang dapat menggerakkan seseorang untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang curang yaitu :

- 1) Tekanan situasional pada karyawan. Karyawan mungkin terlibat utang atau ia mungkin ditekan (baik secara eksternal maupun internal) untuk memperbaiki posisinya.
- 2) Akses terhadap aktiva tidak terkontrol, bersama-sama dengan ketidakpedulian dari manajemen. Salah satu penangkal yang paling kuat bagi kecurangan oleh karyawan dan manajemen adalah kepastian pendeteksian dan hukuman. Kontrol yang kuat dan pengawasan yang ketat makin meningkatkan kepastian ini.
- 3) Kepribadian yang menggerogoti integritas seseorang. Beberapa orang memiliki kecenderungan untuk mengambil jalan yang tidak jujur. Ketika orang lain melihat tidak adanya halangan dalam jalan tersebut, maka mereka akan cenderung untuk ikut melakukannya.

Sedangkan menurut Sukrisno (2004), ada beberapa penyebab terjadinya kecurangan antara lain :

- 1) Kelemahan pengendalian intern seperti :
 - a. Tidak adanya *job description* sehingga terjadi perangkapan tugas
 - b. Kurang baiknya sistem otorisasi
 - c. Tidak berfungsinya bagian internal audit

d. Kurangnya pegawai yang *capable*

e. Tidak adanya *rotation of duties*

- 2) Adanya pegawai dan pejabat yang tidak jujur
- 3) Tidak tegasnya sangsi yang diberikan kepada mereka yang melakukan kecurangan.
- 4) Bonus yang didasarkan pada *performance*, dan lain-lain.

c. Bentuk-bentuk Kecurangan

Menurut Sukrisno (2004), *fraud* atau kecurangan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, diantaranya yaitu :

- 1) *Collusion*, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara bekerja sama dengan tujuan untuk menguntungkan orang-orang tersebut, biasanya merugikan perusahaan atau pihak ketiga.
- 2) *White collar crime*, yaitu kejahatan yang dilakukan orang-orang berdasi (kalangan atas), misalnya mafia tanah.
- 3) *Embezzlement*, yaitu konversi secara tidak sah harta benda untuk kepentingan pribadi.
- 4) *Intentional misrepresentation*, yaitu memberi saran bahwa sesuatu itu benar, padahal itu salah, oleh seseorang yang mengetahui bahwa itu salah.
- 5) *Employee fraud*, yaitu kecurangan yang dilakukan seorang pegawai untuk menguntungkan dirinya sendiri.

- 6) *Management fraud*, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh manajemen sehingga merugikan pihak lain, termasuk pemerintah. Misalnya manipulasi pajak, manipulasi kredit bank, dan lain-lain.

Selain itu menurut ACFE (*Assosiation of Certified Fraud Examiners*) dalam Nani (2010), mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok yaitu sebagai berikut :

1) Kecurangan Laporan Keuangan (*financial statement fraud*)

Kecurangan semacam ini dapat dibagi atas :

- a) *Timing difference (improper treatment of sales)*, adalah bentuk kecurangan terhadap laporan keuangan dengan mencatat waktu transaksi yang berbeda/lebih awal dengan waktu transaksi sebenarnya.
- b) *Fictitious revenues*, adalah bentuk kecurangan laporan keuangan dengan menciptakan pendapatan yang sebenarnya tidak pernah terjadi (*fictive*).
- c) *Concealed liabilities and expenses*, merupakan bentuk kecurangan laporan keuangan dengan menyembunyikan kewajiban perusahaan, sehingga laporan keuangan terlihat bagus.
- d) *Improper disclosure*, yaitu perusahaan tidak melakukan pengungkapan laporan keuangan secara penuh dengan maksud untuk menyembunyikan kecurangan yang terjadi di perusahaan sehingga pembaca laporan keuangan tidak mengetahui keadaan sebenarnya di perusahaan.

e) *Improper asset valuation*, adalah bentuk kecurangan laporan keuangan dengan melakukan penilaian yang wajar/tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum atas asset perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya.

2) Penyalahgunaan asset (*asset misappropriation*)

Penyalahgunaan asset adalah bentuk kecurangan yang dilakukan dengan cara memiliki secara tidak sah dan penggelapan terhadap asset perusahaan untuk memperkaya diri sendiri. Penyalahgunaan asset ini dapat digolongkan menjadi :

- a) Kecurangan kas (*cash fraud*), seperti pencurian kas dan pengeluaran-pengeluaran secara curang seperti pemalsuan asset.
- b) Kecurangan atas persediaan dan asset lainnya (*fraud of inventory and all other asset*), adalah kecurangan berupa pencurian dan pemakaian untuk kepentingan pribadi terhadap persediaan atau asset lainnya.

3) Korupsi (*corruption*)

Menurut ACFE, korupsi terbagi dalam beberapa bentuk :

- a) Pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), yaitu pertentangan kepentingan yang terjadi ketika karyawan, manajer dan eksekutif suatu perusahaan memiliki kepentingan pribadi terhadap transaksi.
- b) Suap (*bribery*), yaitu penawaran, pemberian, penerimaan/permohonan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan dalam membuat keputusan bisnis.

- c) Pemberian ilegal (*illegal gravity*). Pemberian ilegal hampir sama dengan suap, tapi ini bukanlah untuk mempengaruhi keputusan bisnis.
- d) Pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*), pada dasarnya pemerasan secara ekonomi dan merupakan lawan dari suap.

d. Kecurangan Pelaporan Keuangan

Menurut Suwardjono (2006), pelaporan keuangan adalah struktur dan proses tentang bagaimana informasi keuangan untuk semua unit usaha dan pengambilan keputusan ekonomik. Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat misalnya penyusun standar badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor, peraturan yang berlaku termasuk PABU, dan mekanisme penyampaian informasi.

Menurut *Financial Accounting Standards Board (FASB)* dalam *Statement of Financial Accounting Concepts*, pelaporan keuangan digunakan sebagai sistem dan sarana penyampaian (*means of communication*) informasi tentang segala kondisi dan kinerja perusahaan terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui statemen keuangan.

Menurut Amin (2009), kecurangan laporan keuangan adalah perilaku yang disengaja untuk menghasilkan laporan keuangan yang salah secara material. Sedangkan menurut Belkaoui (2006), kecurangan pelaporan keuangan yaitu

kecurangan yang melibatkan penggunaan sistem akuntansi untuk menggambarkan citra yang salah mengenai perusahaan.

Komisi Nasional mengenai Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan (*National Commission on Fraudulent Financial Reporting*) dalam Belkaoui (2006), kecurangan dalam pelaporan keuangan merupakan perlakuan yang disengaja atau sembrono, baik tindakan atau penghilangan, yang menghasilkan laporan keuangan yang secara material menyesatkan. Pelaporan semacam ini menodai integritas dari informasi keuangan dan dapat merugikan sekumpulan korban seperti para pemegang saham, investor, kreditor, karyawan, masyarakat dan sebagainya.

Kecurangan di dalam laporan keuangan dianggap sebagai suatu perlakuan yang disengaja atau sembrono, baik tindakan atau penghilangan yang menghasilkan laporan keuangan yang secara material menyesatkan. Jenis-jenis yang umum dari kecurangan dalam pelaporan keuangan meliputi :

- a) Manipulasi, pemalsuan atau pengubahan catatan-catatan atau dokumen-dokumen.
- b) Penekanan atau penghilangan dampak dari transaksi-transaksi yang sudah selesai dari catatan-catatan dokumen.
- c) Pencatatan transaksi tanpa ada substansinya.
- d) Kesalahan penerapan dalam kebijakan-kebijakan akuntansi.
- e) Kegagalan untuk mengungkapkan informasi yang signifikan.

Dengan meningkatnya kecurangan pelaporan keuangan, disatu sisi menguntungkan pelaku bisnis karena melebih-lebihkan (*over stated*) hasil

usahanya dan kondisi keuangannya sehingga kelihatan baik dimata publik, tetapi pada sisi lain merugikan publik yang sangat menggantungkan keputusan ekonominya dari informasi laporan keuangan. Informasi keuangan yang relevan dan bersih dari unsur *fraud*, akan melahirkan keputusan ekonomi yang tepat bagi pihak ketiga sebaliknya informasi yang mengandung kecurangan akan sangat menyesatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Wilopo (2006) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip yang dapat memecahkan permasalahan kecurangan di dalam pelaporan keuangan adalah dengan memberi kompensasi yang sesuai kepada agen, serta mengeluarkan biaya monitoring. Untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik, diperlukan pengendalian internal perusahaan yang efektif pula.

2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2001), pengendalian adalah usaha mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan. Dalam definisi tersebut, terdapat dua hal penting, yaitu tujuan tertentu yang akan diwujudkan dan perilaku tertentu yang diharapkan.

Menurut Arens (2004), pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori sebagai berikut : (1) keandalan laporan keuangan, (2) efektifitas dan efisiensi dari operasional dan (3) pemenuhan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang biasa diterapkan.

IAI (2001), mendefinisikan pengendalian intern sebagai prosedur yang dihasilkan oleh dewan direksi entitas, manajemen dan personal lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak dalam pencapaian tujuan kategori-kategori berikut : keandalan (*reabilitas*) laporan keuangan, ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan efektivitas serta efisiensi operasi.

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawainya untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut COSO dalam Boynton (2002), sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen dan personal lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan efektifitas serta efisiensi operasi. Berdasarkan tujuan pengendalian intern tersebut, yang relevan dengan suatu audit laporan keuangan adalah keandalan laporan keuangan. Keandalan laporan keuangan menyediakan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen untuk pemakai eksternal telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Menurut Mulyadi (2001), sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan tindakan manajemen. Dari definisi tersebut, dijelaskan bahwa pengendalian intern bertujuan untuk :

- 1) Menjaga kekayaan perusahaan.
- 2) Menghasilkan laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya oleh semua penggunanya.
- 3) Mendorong terciptanya efisiensi dan efektifitas.
- 4) Mendorong dipatuhinya seluruh kebijakan manajemen.

b. Ciri-ciri Sistem Pengendalian Intern yang Memadai

Menurut Mulyadi (20), ada empat unsur pokok yang harus ada jika ingin dikehendaki adanya sistem pengendalian dalam suatu organisasi yaitu :

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan beban atau belanja.
- 3) Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap organisasi.
- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

c. Elemen-Elemen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas 5 (lima) elemen, antara lain :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian mencakup faktor-faktor berikut ini :

- a. Integritas dan nilai-nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Partisipasi Dewan Direksi atau komite audit
- d. Filosofi dan gaya operasional manajemen
- e. Struktur organisasi
- f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab
- g. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia

2. Penilaian Resiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko, yang terdiri atas identifikasi risiko dan analisis resiko. Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

3. Kegiatan Pengendalian

Aktivitas pengendalian meliputi :

- a) Review kinerja
- b) Pengolahan informasi
- c) Pengendalian fisik

d) Pemisahan tugas

4. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi mencakup metode dan catatan yang digunakan untuk:

- a) Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang sah
- b) Menjelaskan pada saat yang tepat transaksi secara cukup rinci untuk memungkinkan penggolongan semestinya transaksi untuk pelaporan keuangan.
- c) Mengukur nilai pencatatan transaksi dalam periode akuntansi semestinya.
- d) Menyajikan transaksi semestinya dan pengungkapan yang berkaitan dalam laporan keuangan.

Menurut PP No.60 Tahun 2008, informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

5. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern, dilakukan pengawasan intern

dan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

Wilopo (2006) menyatakan jika suatu pengendalian internal perusahaan lemah, maka akan mengakibatkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi yang ada tidak teliti dan tidak dapat dipercaya, tidak efisien dan efektifnya kegiatan-kegiatan operasional/perusahaan serta tidak dapat dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang ditetapkan.

3. Kesesuaian Kompensasi

a. Pengertian Kompensasi

Menurut Veithzal (2006), kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi MSDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian. Kompensasi merupakan biaya utama atas keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan dalam bisnis perusahaan. Sedangkan menurut Griffin (2004), kompensasi adalah *remunerasi financial* yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka.

Menurut Hasibuan (2005), kompensasi adalah semua pendapatan berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi berbentuk uang artinya kompensasi dibayar dengan sejumlah uang kartal kepada

karyawan sedangkan kompensasi berupa barang artinya kompensasi dibayar dengan barang.

Menurut William dan Keith dalam Hasibuan (2005), kompensasi adalah apa yang seorang pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya. Sedangkan menurut F.Sikula dalam Hasibuan (2005), kompensasi adalah segala sesuatu yang dikonstitusikan atau dianggap sebagai suatu balas jasa.

Kompensasi bisa berupa fisik maupun non fisik harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada organisasi/perusahaan tempat ia bekerja. Perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada para pekerja terlebih dahulu melakukan penghitungan kinerja dengan membuat sistem penilaian kinerja yang adil. Sistem tersebut umumnya berisi kriteria penilaian setiap pegawai yang ada misalnya mulai dari jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan, kecepatan kerja, komunikasi dengan pekerja lain, pengetahuan atas pekerjaan dan sebagainya.

Menurut Veithzal (2006), kompensasi yang diberikan kepada karyawan terdiri dalam dua bentuk yaitu :

1) Kompensasi yang bersifat *financial*

Bentuk kompensasi ini ada dua macam, yaitu :

- a. Kompensasi langsung, terdiri dari pembayaran karyawan dalam bentuk upah, gaji, bonus, atau komisi.
- b. Kompensasi tidak langsung atau benefit, terdiri dari semua pembayaran yang tidak tercakup dalam kompensasi financial langsung yang meliputi liburan, berbagai macam asuransi, jasa

seperti perawatan anak atau kepedulian keagamaan, dan sebagainya.

2) Kompensasi yang bersifat *non financial*

Bentuk kompensasi ini seperti pujian, menghargai diri sendiri, promosi jabatan, dan pengakuan yang dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan, produktifitas, dan kepuasan.

b. Tujuan Manajemen Kompensasi

Secara umum, tujuan manajemen kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuan keberhasilan strategi perusahaan dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Keadilan eksternal menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan akan dikompensasi secara adil dengan membandingkan pekerjaan yang sama di pasar kerja. Namun, tujuan kompensasi yang efektif meliputi :

- a) Memperoleh SDM yang berkualitas
- b) Mempertahankan karyawan yang ada
- c) Menjamin keadilan
- d) Penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan
- e) Mengikuti aturan hukum
- f) Meningkatkan efisiensi administrasi

Sedangkan menurut Hasibuan (2005), tujuan pemberian kompensasi dibedakan atas delapan macam yaitu :

- 1) Sebagai ikatan kerja sama

- 2) Kepuasan kerja
- 3) Motivasi
- 4) Stabilitas karyawan
- 5) Disiplin
- 6) Pengaruh serikat buruh
- 7) Pengaruh pemerintah

Kompensasi adalah suatu bagian penting dan kompleks dalam hubungan karyawan dan organisasi. Kompensasi dapat diperlukan untuk menyediakan karyawan dengan alasan untuk mempertahankan suatu standar hidup yang layak. Akan tetapi diluar titik ini, kompensasi juga menyediakan suatu pengukuran berwujud mengenai nilai individu bagi organisasi. Jika karyawan tidak cukup mendapatkan penghasilan untuk memenuhi tujuan ekonomi dari mereka, mereka akan mencari pekerjaan di tempat lain. Demikian pula jika mereka percaya bahwa kompensasi mereka dinilai rendah, mereka mungkin akan melakukan kebiasaan pekerjaan yang buruk, moral yang rendah dan komitmen yang sedikit terhadap organisasi.

c. Komponen-Komponen Kompensasi

Menurut Griffin (2004), ada tiga bentuk dasar kompensasi yaitu :

- 1) Upah (*wages*) adalah kompensasi perjam yang dibayarkan kepada karyawan operasional.
- 2) Gaji (*salary*) adalah komponen yang dibayarkan untuk kontribusi total, sebagai ganti dari pekerjaan yang dilakukan berjam-jam.

3) Insentif (*incentives*) mencerminkan kesempatan kompensasi khusus yang biasanya terkait dengan kinerja. Komisi dan bonus merupakan insentif yang paling umum.

Sedangkan menurut Veithzal (2006), komponen-komponen kompensasi terdiri atas 4 macam. komponen tersebut yaitu :

a. Gaji

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan.

b. Upah

Upah merupakan imbalan financial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan dan besarnya dapat berubah-ubah tergantung pada keluaran yang dihasilkan.

c. Insentif

Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan.

d. Kompensasi tidak langsung (*Fringe Benefit*)

Fringe benefit merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Contohnya, berupa fasilitas-fasilitas, seperti asuransi, tunjangan, uang pensiun, dan lain-lain.

Hasil penelitian Wilopo (2006) memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya, pemberian kompensasi yang sesuai pada perusahaan BUMN di Indonesia tidak secara signifikan menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi dari manajemen perusahaan.

d. Metode Kompensasi

Menurut Hasibuan (2005), metode kompensasi (balas jasa) ada dua yaitu ;

1) Metode tunggal

Yaitu suatu metode yang dalam penetapan gaji pokok hanya didasarkan atas ijazah terakhir dari pendidikan formal yang dimiliki karyawan. Jadi tingkat golongan dan gaji seseorang hanya ditetapkan atas ijazah terakhir yang dijadikan standarnya.

Misalnya : pegawai negeri ijazah formal S-1, maka golongannya ialah III-A, dan gajinya adalah gaji pokok III-A untuk setiap pegawai sama.

2) Metode Jamak

Yaitu suatu metode yang dalam gaji pokok didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan informal, bahkan hubungan keluarga ikut menentukan besarnya gaji pokok seseorang. Jadi standar gaji pokok yang pasti tidak ada. Biasanya terdapat pada perusahaan swasta yang didalamnya masih sering terjadi diskriminasi.

4. Moralitas

Menurut Surajiyo (2008), moral berasal dari kata latin *mos* jamaknya *mores* yang berarti adat atau cara hidup. Kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia itu sebagai manusia. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai.

Menurut Dewey dalam Asri (2004), moral merupakan hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai susila. Sedangkan Baron dkk dalam Asri (2004), mengatakan moral adalah hal-hal yang berhubungan dengan larangan dan tindakan yang membicarakan salah atau benar.

Menurut Magnis-Suseno dalam Asri (2004), moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, sehingga bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebbaikannya sebagai manusia. Magnis mengatakan bahwa sikap moral yang sebenarnya disebut moralitas. Ia mengatakan moralitas sebagai sikap hati orang yang terungkap dalam tindakan lahiriah. Moralitas terjadi apabila orang mengambil sikap yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan karena ia mencari keuntungan. Jadi moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih. Hanya moralitaslah yang bernilai secara moral.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral berarti ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Sedangkan bermoral berarti mempunyai pertimbangan baik buruk, berakhlak baik. Selanjutnya dikatakan bahwa, kriteria mutu moral seseorang adalah hal kesetiaannya pada hatinya sendiri. Moralitas merupakan pelaksanaan kewajiban

karena hormat terhadap hukum, sedangkan hukum itu sendiri tertulis dalam hati manusia. Dengan kata lain, moralitas adalah tekad untuk mengikuti apa yang ada dalam hati manusia dan disadari sebagai kewajiban mutlak. Moral dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Moral murni, yaitu moral yang terdapat pada setiap manusia. Moral murni disebut juga hati nurani.
- 2) Moral terapan, adalah moral yang didapat dari ajaran berbagai ajaran filosofis, agama, adat yang menguasai pemutaran manusia.

Sedangkan menurut Surajiyo (2008), ada dua macam kaidah moral yaitu :

- a) Kaidah sikap baik

Kaidah sikap baik mendasari semua norma moral. Berdasarkan kaidah ini kita wajib untuk mengusahakan suatu kelebihan sikap dari akibat yang baik.

- b) Kaidah keadilan

Kaidah ini mengandung kewajiban untuk memberi perlakuan yang sama kepada semua orang dalam pembagian dari yang baik dan yang buruk.

Untuk memiliki moralitas yang baik dan benar, seseorang tidak cukup sekedar telah melakukan tindakan yang dapat dinilai baik dan benar. Seseorang dapat dikatakan sungguh-sungguh bermoral apabila tindakannya disertai dengan keyakinan dan pemahaman akan kebaikan yang tertanam dalam tindakan tersebut.

Peranan moral yang baik dari seseorang pimpinan dan komitmennya yang kuat, sangat mendorong tegaknya suatu etika dalam suatu organisasi dan dapat dijadikan dasar bertindak dan suri tauladan bagi seluruh pegawai. Pimpinan tidak

bisa menginginkan suatu etika dan perilaku yang tinggi dari suatu organisasi sementara pimpinan itu sendiri tidak sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Sementara itu manajemen harus memperlihatkan kepada karyawan tentang adanya kesesuaian antara kata dengan perbuatan dan tidak memberikan toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar kaedah-kaedah etika organisasi yaitu dengan diberikannya sanksi hukuman yang jelas, dan demikian pula sebaliknya terhadap pegawai yang berprestasi dan bermoral baik diberikan penghargaan yang proporsional pula.

Wilopo (2006), berpendapat bahwa semakin tinggi tahapan moralitas manajemen, berarti semakin manajemen memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal dari kepentingan perusahaan semata, terlebih kepentingan pribadinya. Oleh karenanya, semakin tinggi moralitas manajemen, semakin manajemen berusaha menghindarkan diri dari kecenderungan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

B. Penelitian Yang Relevan

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006), mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi : Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia.

Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian Wilopo yaitu keefektifan pengendalian intern, kesesuaian kompensasi, ketaatan pada aturan akuntansi,

asimetri informasi, serta moralitas manajemen. Sedangkan sumber data yang digunakan berupa pendapat dan persepsi dari personil dalam perusahaan terbuka dan BUMN yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu direktur atau manajer keuangan/akuntansi. Populasi yang dilakukan saat penelitian terdiri dari 477 perusahaan. Pemilihan populasi dilakukan dengan cara random sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 161 sampel.

Hasil penelitian Wilopo (2006) menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan negatif, kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh signifikan, dan moralitas memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan akuntansi.

Lebih lanjut, hasil penelitian Arie (2008), mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Sumatera Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif, kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh signifikan dan moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

Selain itu, pada penelitian Nani (2010) dan Fitriana (2010), sama-sama menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan daerah.

C. Hubungan Antar Variabel

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang dibangun pemerintah dengan tujuan untuk pengamanan asset negara, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Apabila sistem pengendalian intern pemerintah efektif, maka akan menyulitkan karyawan atau pegawai melakukan tindakan yang dapat merugikan pemerintah seperti melakukan manipulasi terhadap pencatatan laporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawainya untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Sawyer (2006), Lingkungan dapat mengundang terjadinya penggelapan atau kecurangan. Hal ini biasanya merupakan situasi dimana tidak terdapat kontrol, atau kontrol internnya lemah, atau terdapat kontrol intern namun tidak berfungsi. Selain itu menurut Amin (2009), untuk mendukung perangkat anti kecurangan terhadap laporan keuangan, diperlukan pengendalian intern yang ketat.

Wilopo (2006) menyatakan jika suatu pengendalian internal perusahaan lemah, maka akan mengakibatkan kekayaan perusahaan tidak terjamin

keamanannya, informasi akuntansi yang ada tidak teliti dan tidak dapat dipercaya, tidak efisien dan efektifnya kegiatan-kegiatan operasional/perusahaan serta tidak dapat dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang ditetapkan.

Menurut Fitrina (2010), jika suatu struktur pengendalian intern di instansi pemerintah daerah lemah, maka akan mengakibatkan kekayaan atau aset suatu negara yang dikelola pemerintah daerah tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi yang ada tidak diteliti dan tidak dapat dipercaya, tidak efisien dan efektifnya kegiatan-kegiatan operasional entitas serta tidak dapat dipatuhinya kebijakan Kepala Daerah dan perundang-undangan yang ditetapkan.

Menurut Arie (2008), Nani (2010) dan Fitrina (2010), sistem pengendalian intern yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif sistem pengendalian internal pada perusahaan maka akan mengurangi kecurangan pelaporan keuangan. Sebaliknya, apabila sistem pengendalian intern lemah, maka akan memudahkan terjadinya kecurangan terhadap laporan keuangan yang disajikan. Jika suatu pengendalian intern lemah dalam suatu perusahaan, maka akan memudahkan karyawan untuk mengambil harta kekayaan perusahaan untuk kepentingan pribadinya sehingga nantinya akan membuat harta kekayaan perusahaan hilang yang bisa memicu untuk melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan perusahaan.

2. Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Menurut Hasibuan (2005), kompensasi adalah semua pendapatan berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Menurut Amin (2009), salah satu faktor penyebab kecurangan pelaporan keuangan adalah insentif untuk melakukan kecurangan yaitu adanya porsi yang tidak signifikan dari kompensasi. Pemberian kompensasi terhadap karyawan dapat mengarah kepada perlakuan yang tidak semestinya terhadap kas. Seorang karyawan yang memiliki masalah keuangan bisa menyalahgunakan kas atau uang yang ada di tangannya. Sedangkan menurut Sawyer (2006), situasi ini dapat disebabkan oleh alasan keuangan yang dipengaruhi oleh kompensasi atau upah yang diterima, karena pengeluaran atau kerugian uang lainnya yang tidak dapat ditutupi oleh sumber daya keuangan yang normal dari individu tersebut. Kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan bisa membuat karyawan merasa tidak puas terhadap imbalan yang diberikan dan melakukan hal-hal yang dapat memberikan tambahan keuntungan terhadapnya dan berdampak terhadap laporan keuangan.

Hasil penelitian Wilopo (2006) memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya, pemberian kompensasi yang sesuai pada perusahaan BUMN di Indonesia tidak secara signifikan menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi dari manajemen perusahaan.

Wilopo (2006) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip yang dapat memecahkan permasalahan kecurangan di dalam pelaporan keuangan adalah

dengan memberi kompensasi yang sesuai kepada agen, serta mengeluarkan biaya monitoring.

3. Moralitas terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Menurut Magnis-Suseno dalam Asri (2004), moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, sehingga bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebbaikannya sebagai manusia. Magnis (2004) mengatakan bahwa sikap moral yang sebenarnya disebut moralitas. Ia mengatakan moralitas sebagai sikap hati orang yang terungkap dalam tindakan lahiriah. Jadi moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih. Hanya moralitaslah yang bernilai secara moral.

Menurut Amin (2009), kecurangan dapat disebabkan oleh tingkah laku/rasionalisasi. Sedangkan Menurut Sawyer (2006), salah satu penyebab kecurangan ialah kepribadian yang menggerogoti integritas seseorang. Beberapa orang memiliki kecenderungan untuk mengambil jalan yang tidak jujur. Ketika orang lain melihat tidak adanya halangan dalam jalan tersebut, maka mereka akan cenderung untuk ikut melakukan kecurangan.

Amin (2009) menyatakan bahwa moral atau tingkah laku juga akan menjadi faktor pemicu kecurangan terhadap laporan keuangan. Adanya perubahan tingkah laku atau moral bisa menjadikan seseorang menyalahgunakan kas/aktiva yang ada. Penyalahgunaan ini nantinya akan berusaha ditutupi melalui manipulasi terhadap laporan keuangan.

Wilopo (2006), berpendapat bahwa semakin tinggi tahapan moralitas manajemen, berarti semakin manajemen memperhatikan kepentingan yang lebih

luas dan universal dari kepentingan perusahaan semata, terlebih kepentingan pribadinya. Oleh karenanya, semakin tinggi moralitas manajemen, semakin manajemen berusaha menghindarkan diri dari kecenderungan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Berdasarkan penelitian Arie (2008) dan Nani (2010), moralitas memberikan pengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan. Apabila moral manajemen atau pegawai rendah, mereka akan melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, dan nantinya untuk menutupi hal tersebut, mereka akan melakukan tindakan seperti memanipulasi data yang berkaitan dengan laporan keuangan.

D. Kerangka Konseptual

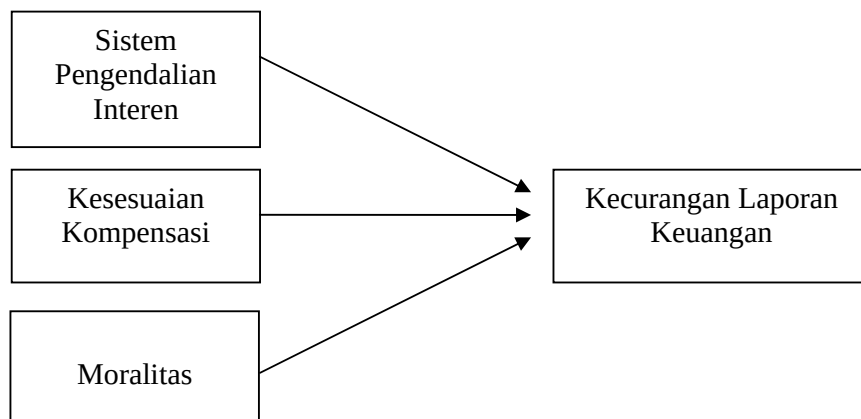
Kerangka konseptual memperlihatkan hubungan atau kaitan antara variabel independen dengan variabel dependen, dan dalam penelitian ini akan memperlihatkan terdapatnya hubungan antara pengaruh keefektifan sistem pengendalian intern, kesesuaian kompensasi dan moralitas terhadap kecurangan laporan keuangan daerah.

Kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku yang disengaja, baik dengan tindakan atau penghapusan yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan (bias). Kecurangan pelaporan keuangan merupakan problem yang dapat terjadi baik di perusahaan maupun di Dinas Pemerintah mana saja maupun kapan saja.

Penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini dapat terjadi jika suatu pengendalian intern lemah dalam suatu perusahaan, maka akan memudahkan karyawan untuk mengambil harta kekayaan perusahaan untuk kepentingan pribadinya sehingga nantinya akan membuat harta kekayaan perusahaan hilang yang bisa memicu untuk melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan perusahaan.

Begitu juga terhadap kesesuaian kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan yang bisa membuat karyawan merasa tidak puas terhadap imbalan yang diberikan dan melakukan hal-hal yang dapat memberikan tambahan keuntungan terhadapnya dan berdampak terhadap laporan keuangan. Dan moralitas dari manajemen itu sendiri juga mempengaruhi kecurangan laporan keuangan. Jika moralitas manajemen yang rendah, bisa saja melakukan hal-hal yang bisa merugikan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 1 : Kerangka Konseptual

E. Hipotesis

Berdasarkan uraian latar belakang, kajian teori dan kerangka konseptual yang telah dibuat, maka didapat hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Penerapan sistem pengendalian interen berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

H₂ : Kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

H₃ : Moralitas berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kesesuaian Kompensasi dan Moralitas Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan laporan keuangan daerah pemerintah Kota Padang. Di mana semakin baik penerapan sistem pengendalian intern pemerintah maka akan semakin menurun tingkat kecurangan laporan keuangan daerah (H_1 diterima).
2. Kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan laporan keuangan daerah pemerintah Kota Padang. Di mana semakin tinggi tingkat kompensasi yang diberikan maka akan semakin menurun tingkat kecurangan laporan keuangan daerah (H_2 diterima).
3. Moralitas berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan laporan keuangan daerah pemerintah Kota Padang. Di mana semakin tinggi moralitas pegawai maka akan semakin menurun tingkat kecurangan laporan keuangan daerah (H_3 diterima).

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 16%. Sedangkan 84% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kecurangan laporan keuangan daerah.
2. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

C. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintahan, kesesuaian kompensasi dan moralitas pegawai telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada munculnya kecurangan laporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh pemerintah. Pemerintah harus melakukan penilaian yang lebih baik terhadap kinerja pimpinan atau kepala

SKPD. Selain itu pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai sistem pengendalian intern pemerintahan, kompensasi dan moralitas pegawai dalam pembuatan laporan keuangan agar kecurangan laporan keuangan daerah dari pemerintah dapat terus dikurangi bahkan dapat dihilangkan.

2. Penelitian ini masih terbatas pada penerapan sistem pengendalian intern pemerintahan, kesesuaian kompensasi dan moralitas terhadap kecurangan laporan keuangan daerah, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap kecurangan laporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh pemerintah.
3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu di mana staf akuntansi SKPD dalam kenyataannya belum sepenuhnya atau belum maksimal dalam membuat laporan keuangan SKPD, namun pada jawaban responden mereka telah mampu melakukannya. Jadi dalam penelitian ini masih terdapat kelemahan yaitu ada beberapa responden yang mengisi kuesioner penelitian yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, maka untuk penelitian selanjutnya dapat disertai dengan penelitian kualitatif dan penggantian teknik pengambilan sampel penelitian, serta dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Widjaja Tunggal. 2009. *Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud)*. Jakarta : Harvarindo.
- Arens, Alvin A. 2004. *Auditing dan Pelayanan Verifikasi Pendekatan Terpadu*. Jakarta : PT. Indeks.
- Arens, Alvin A. Randal J. Elder & Mark S. Beasley. 2004. *Auditing & Assurance Services An Integrated Approach*. Jakarta : PT. Indeks.
- Arie Anggraina Aviora. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur di Sumatera Barat. *Skripsi*. Padang. FE-Universitas Bung Hatta.
- Asri Budiningsih. 2004. *Pembelajaran Moral*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Belkaoui, Ahmad Riahi. 2006. *Accounting Theory*. Jakarta : Salemba Empat.
- Boynton, William C. Johnson and Kell. 2002. *Modern Auditing (Edisi Ketujuh)*. Jakarta : Erlangga.
- Fitrina Gusvi. 2010. Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Interen dan Peran Inspektorat terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi. *Skripsi*. Padang. FE-Universitas Negeri Padang.
- Griffin, W. Ricky. 2004. *Manajemen*. Jakarta : Erlangga.
- Husein Umar. 2005. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- IAI. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) per Januari 2001*. Jakarta: Salemba empat.
- Imam Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Undip: Semarang.
- Malayu SP. Hasibuan. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mardi. 2009. *Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal*. Diakses melalui www.SUMBARPROV.co.id.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-YPKN.